

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *ELECTRONIC BUDGETING* DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Ayu Dwi Rismanda
NPP. 29.0592
Asdaf Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Keuangan Publik

Email: ayudwir206@gmail.com

ABSTRACT

The author focuses on how a regional autonomy provides opportunities and flexibility for each region to organize its government independently, including in managing regional finances, so that the DKI Jakarta Provincial Government makes a new program breakthrough related to *online*, namely *electronic budgeting*. **Purpose:** The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the implementation of *electronic budgeting* in the preparation of the regional government budget of DKI Jakarta Province. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the theory of effectiveness of computer-based systems from Kenneth C. Laudon & Jane Laudon. Data collection techniques using in-depth interviews (6 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this study are *electronic budgeting* which are quite difficult to operate. Then there are no technical instructions (modules) regarding the procedures for budgeting and operating the *electronic budgeting system*. **Conclusion:** The effectiveness of the implementation of *electronic budgeting* in the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget of DKI Jakarta Province is still not effective because there are obstacles caused by several factors. Efforts made by the Regional Financial Management Agency in overcoming these obstacles by coordinating with relevant agencies both vertically and horizontally.

Keywords: Effectivity, Implementation, *Electronic Budgeting*

ABSTRAK

Penulis berfokus pada bagaimana suatu otonomi daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri termasuk dalam mengelola keuangan daerah, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat terobosan program baru berkaitan dengan penyusunan anggaran yang bersifat *online* yaitu *electronic budgeting*. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas pelaksanaan *electronic budgeting* dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori efektivitas sistem berbasis komputer dari Kenneth C. Laudon & Jane Laudon. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (6 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu program atau perangkat lunak (*software*) *electronic budgeting* yang cukup sulit dioperasikan. Kemudian

tidak adanya petunjuk teknis (modul) mengenai tata cara penyusunan anggaran dan pengoperasian sistem *electronic budgeting*. **Kesimpulan:** Efektivitas pelaksanaan *electronic budgeting* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta masih belum efektif karena ada kendala yang disebabkan beberapa faktor. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertical maupun horizontal.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem, *Electronic Budgeting*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 menghasilkan perubahan yang sangat penting yaitu dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan dan juga pergeseran yang pokok dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, kewenangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat untuk mengendalikan pemerintah daerahnya sendiri. Kegiatan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kebutuhannya, yang tidak melanggar peraturan pemerintah pusat yang berlaku saat ini dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan. Pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang terbilang *good governance* berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, serta partisipasi publik yang terbuka untuk mencapai tujuan pembangunan, Negara Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi, dimana pemerintah pusat memberikan hal ihwal pemerintahan untuk daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Asas otonomi daerah yaitu merupakan asas dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasari oleh otonomi daerah, dengan memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Setiap daerah memiliki peluang atau kuasa untuk melaksanakan otonomi daerah dan juga bertanggung jawab secara proporsional untuk daerah. Selain itu, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah supaya sumber daya keuangan yang ada, bisa dikelola untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan Pengawasan Daerah. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah satu dari beberapa daerah yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi (*electronic budgeting*) sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan *electronic budgeting* dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu ketika mengubah proses penganggaran APBD dari sistem manual ke sistem elektronik melalui aplikasi yang disebut penganggaran elektronik saat pelaksanaannya terdapat kejanggalan pada penyusunan APBD. Pada tahun 2019 ditemukan beberapa kejanggalan yang tidak masuk akal, yaitu pengadaan Lem Aibon mencapai 82,8 Miliar dalam Rancangan KUA-PPAS untuk APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Penyusunan anggaran lagi-lagi ditemukan kejanggalan pada penyusunan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2021, yaitu adanya temuan anggaran yang janggal untuk kegiatan DPRD DKI Jakarta yang besarnya cukup banyak. Salah satunya adalah

Belanja perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD. Sub kegiatan terakhir pada kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD senilai Rp 41.458.540.986 diuraikan ke dalam obyek belanja dimana uraian isi pada kegiatan-kegiatan didalamnya sangatlah dinilai tidak teratur, sehingga Kemendagri melihat anggaran tersebut sebagai anggaran janggal. Penemuan kejanggalan ini ditemukan setelah dokumen yang sudah mendapat persetujuan itu dievaluasi di tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Gubernur DKI Jakarta, Anies, mengaku dirinya tidak bersalah dalam temuan anggaran yang janggal tersebut. Ia menjelaskan bahwa mata anggaran yang janggal dan jadi kontroversi itu disebabkan oleh sistem *e-budgeting* yang masih manual. Sistem *e-budgeting* yang menurutnya kurang ini, sudah diketahui sejak tahun 2019. Ia ingin sistem ini menolak anggaran-anggaran yang tidak masuk akal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini telah diperbaharui dan menghasilkan hasil yang baru serta berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian Anggi Pratama Nasution dan Atika berjudul *Implementasi E-Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai*, menemukan bahwasannya pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi, karena pelaksanaan anggaran di Pemkot Binjai baru berjalan 1 (satu) tahun dan belum optimal.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Faiz Marwan Prayoga yang berjudul *Studi Literatur Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting Dalam Sektor Publik*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya perlu dilakukan implementasi dan peningkatan implementasi sistem anggaran di sektor publik.

Penelitian berikutnya yaitu dari Rizka Khoirunnisak, Desy Arishanti dan Dien Dadeka Vebrianti yang berjudul *Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance*, yang berkesimpulan bahwasannya peningkatan lebih lanjut dari pengembangan dan peningkatan sistem, kualitas sumber daya manusia dan inovasi diperlukan untuk mencapai tata kelola yang baik melalui penganggaran.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu *Electronic Budgeting*. Selain itu penelitian ini juga dilakukan pada lokasi penelitian yaitu Provinsi DKI Jakarta dimana didalam penelitian ini menemukan beberapa temuan permasalahan yang berbeda dari penelitian dari Anggi Pratama Nasution dan Atika, Faiza Marwan Prayogam Rizka Khoirunnisak, Desy Arishanti dan Dien Dadeka Vebrianti. Selain itu pelaksanaan dari *Electronic Budgeting* merupakan inovasi program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana prinsipnya *E-Budgeting* merupakan alat untuk menyusun RAPBD DKI Jakarta dimana data akan terinput secara elektronik atau online dan sudah menggunakan keamanan password. Dengan sistem ini harapannya akan mempermudah untuk memasukan anggaran yang akan dibuat.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan *Electronic Budgeting* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta serta untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan hambatan serta strategi

yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dari *Elenctronic Budgeting* tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Program *Electronic Budgeting* ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris BPKD Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, dan Keuangan, Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Kepala Subbidang Anggaran dan Kesejahteraan dan Pennyelia Bidang Anggaran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas pelaksanaan *Electronic Budgeting* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan teori dari Kenneth C. Laudon & Jane Laudon. Teori tersebut memiliki 4 dimensi efektivitas sistem berbasis komputer yaitu Organisasi, Manajemen, Teknologi dan Keahlian. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Organisasi

Salah satu indikator didalam organisasi adalah pembagian kerja dimana pegawai di BPKD Provinsi DKI Jakarta semua terlibat di dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Hal ini menandakan bahwa para pegawai telah paham akan tugas dan fungsi yang telah diberikan sesuai dengan bidangnya masing- masing. Kemudian pada indikator koordinasi dimana dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, koordinasi sering merupakan suatu proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, dan kepada komunikator lain sering terjadi permasalahan. Penyusunan *e-budgeting* melibatkan berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sehingga komunikasi antar instansi harus berjalan dengan baik. Maka dari itu, BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam proses penyusunan anggaran melalui *Electronic Budgeting* telah melakukan koordinasi kepada setiap SKPD supaya tidak ada lagi kesalahan dalam proses penginputan sehingga sistem tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya kurangnya koordinasi memang masih menjadi kendala pada penyusunan APBD sehingga koordinasi antara pegawai di BPKD belum maksimal. Selanjutnya dalam dimensi organisasi terdapat indikator sumber daya manusia dimana Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam pelaksanaan sistem *electronic budgeting* harus memiliki keterampilan serta pemahaman terhadap sistem komputerisasi sehingga dalam pengoperasian sistem *electronic budgeting* ini dapat memasukan komponen dalam anggaran belanja dengan benar serta kode rekening didalam suatu kegiatan yang diajukan. Namun pada kenyataannya dimana pegawai pada BPKD Provinsi DKI Jakarta memiliki keterampilan mengenai pengoperasian komputer, namun ada juga yang belum berkompeten pada bidangnya. Adapun permasalahan lain yaitu jika terdapat revisi, akan sangat memerlukan tenaga yang ekstra sehingga itu juga menjadi salah satu kendala dalam hal sumber daya manusia.

3.2 Manajemen

Pada dimensi manajemen indikator keterbukaan informasi, Badan pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan indikator tersebut dengan baik. Pada pernyataan tersebut, penulis menggaris besarkan bahwa BPKD Provinsi DKI Jakarta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mencegah peluang para oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penyelewengan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya website <https://apbd.jakarta.go.id> yang menyajikan data dan Analisa yang bersifat terbuka untuk publik dengan platform interaktif yang dapat diakses oleh seluruh warga Jakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. Sehingga indikator mutu/kualitas ini masih belum efektif dalam pencapaiannya. Selanjutnya pada indikator kontrol pimpinan menunjukkan bahwa dalam kontrol pimpinan merupakan unsur penting dalam keberlangsungan organisasi agar lebih tertata. Badan Pengelola Keuangan Daerah telah menerapkan dengan baik indikator kontrol pimpinan. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya id dan password dari pimpinan kepada bendahara pengeluaran untuk mempermudah melakukan pembayaran. Maka dari itu, dapat dikatakan kontrol pimpinan berjalan dengan baik. Kemudian pada indikator kesesuaian standar operasional prosedur dimana bahwa buku pedoman dalam bentuk buku memang belum ada namun dalam pelaksanaannya sudah ada dilakukannya pelatihan serta sosialisasi tentang pelaksanaan sistem kerja *Electronic Budgeting* sampai pengoperasian sistem tersebut.

3.3 Teknologi

Pada indikator kemampuan sistem dalam mengantisipasi akses pigak yang tidak berkepentingan dimana Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan teori tersebut dimana dengan diterapkannya sistem *elecronic budgeting* ini data yang telah diinput oleh sistem tidak dapat diutak-atik kembali. Anggaran yang telah disusun dapat terjamin keamanannya karena terdapat laman sign in yang hanya dimiliki oleh Kepala SKPD dan bendahara di SKPD tersebut. Dengan adanya laman sign in, pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat masuk dan juga akses tersebut tidak sembarangan diakses oleh orang yang tidak bertanggungjawab terhadap data tersebut. Kemudian dalam penyampaian informasi bahwa yang terjadi di lapangan telah sesuai dengan teori Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon pada dimensi teknologi, dimana penyampaian informasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan baik.

3.4 Keahlian

Pada dimensi keahlian terdapat indikator kriteria penerapan pegawai dimana kriteria penetapan pegawai dilakukan dengan melihat bagaimana kinerja pegawai tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu penetapan pegawai dari awal memang sudah ditetapkan masing-masing jadi mereka sudah bekerja dengan tupoksinya masing-masing. Selanjutnya pada indikator peningkatan keahlian pegawai terhadap sistem informasi dan teknologi ahwa pegawai sudah 60% menguasai teknologi, tinggal sedikit mengikuti pelatihan sehingga keahlian pegawai dapat dikatakan maksimal.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program *Electronic Budgeting* ini memberikan dampak positif selain bagi BPKD Provinsi DKI Jakarta juga bagi masyarakat sendiri. Dikarenakan program ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa memantau serta mengetahui tentang rancangan anggaran yang akan dibuat oleh pemerintah setempat. Selain itu, manfaat dari adanya *Electronic Budgeting* ini adalah sebagai inovasi baru untuk mempermudah berjalannya roda pemerintahan yang transparan dan dapat dipercaya.

Program ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Anggi Pratama Nasution dan Atika (Anggi Pratama Nasution dan Atika, 2019), namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu situs atau website *electronic budgeting* yang terkadang sulit di akses serta minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang mengelola dan mengoperasikan *Electronic Budgeting*.

Selain itu, program *Electronic Budgeting* ini berbeda dari penelitian Faiz Marwan Prayoga (Faiz Marwan Prayoga, 2021) dimana penelitian ini lebih kepada penilaian sistem sehingga dapat dilihat efektif atau tidaknya pelaksanaan dari *electronic budgeting*.

Efektivitas pelaksanaan *Electronic Budgeting* ini tergolong baru sehingga masih banyak harus diperbaharui serta ditingkatkan untuk dapat memperkuat sistem didalamnya seperti temuan dari Rizka Khoirunnisak, Desy Arishanti, and Dien Dadeka Vebrianti (Rizka Khoirunnisak, Desy Arishanti, and Dien Dadeka Vebriant, 2017).

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam efektivitas pelaksanaan *electronic budgeting* ini yaitu program atau perangkat lunak (*software*) *electronic budgeting* yang cukup sulit dioperasikan. Selanjutnya tidak adanya petunjuk teknis (modul) mengenai tata cara penyusunan anggaran dan pengoperasian sistem *electronicbudgeting* . Selain itu situs atau website *electronic budgeting* yang terkadang sulit diakses dan minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mengelola dan mengoperasikannya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas dari pelaksanaan *Electronic Budgeting* ini belum berjalan efektif faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan *electronic budgeting* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah program atau perangkat lunak (*software*) *electronic budgeting* yang cukup sulit dioperasikan. Tidak adanya petunjuk teknis (modul) mengenai tata cara penyusunan anggaran dan pengoperasian sistem *electronicbudgeting*. Situs atau website *electronic budgeting* yang terkadang sulit di akses. Minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang mengelola dan mengoperasikan *electronic budgeting*. Guna mengatasi hambatan tersebut BPKD Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya yaitu Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal ataupun membuat jadwal untuk akses kedalam sistem *Electronic Budgeting* supaya tidak lelet ketika mengoperasikannya karena keterbatasan server. Melakukan konsultasi terkait pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran melalui sistem *electronic budgeting* dengan pihak konsultan *electronic budgeting* yang telah ditunjuk.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Kenneth C. Laudon & Jane Laudon.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program *Electronic Budgeting* untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012)
- Ahyar, Hardani, and Dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020)
- Akbar, P.S. & Usman, H., *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Bastian, Indra, *Bastian, Indra. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3, Jakarta: Erlangga* (Jakarta: Erlangga, 2016)
- Beni, *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi, Buku 1* (Jakarta Pusat: Taushia, 2016)
- Laudon, Kenneth C. dan Laudon, Jane P., *Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital (13th Edittion)* (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Mardiasmo, *Efisiensi Dan Efektifitas* (Jakarta: Andy, 2016)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Khoirunnisak, Rizka, Desy Arishanti, and Dien Dadeka Vebrianti. 2017. "Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota." *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis* 2017:27-28
- Nasution, Anggi Pratama, and Atika. 2019. "Implementasi E-Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik* 9(2):1-13